

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI DESA  
TEULAGA TUJOH (PUSONG)  
KECAMATAN LANGSA BARAT - KOTA LANGSA**

**Thursina Mahyuddin**

Email : thursina@student.usu.ac.id

Jl. T.M. Hanafiah No. 1 Program Studi Magister Studi Pembangunan  
Universitas Sumatera Utara

**Diterima 30 Agustus 2013/ Disetujui 13 September 2013**

**Abstract**

*This research aims to analyze the participation of the community in the implementation of development programs in the villages of Teulaga Tujoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa and to knowing the factors supporting and restricting the execution of development in the villages of Teulaga Tujoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Descriptive research method using kualitative with the literature and key informants answer results. The study results conclude partisipation community Teulaga Gampong Tujoh (Pusong) Subdistrict of Langsa Timur in the context of the development of coastal protection is still in the stage of manipulation as well as intense as the explanation of notice Arnsteindalam the concept of a ladder of participation.*

*Keywords : Public Participation, Gampong and Rural Safety Beach Programme.*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan pengaman pantai di Desa TeulagaTujoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembangunan pengaman pantai di Desa Teulaga Tujoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatis dengan literatur dan hasil jawaban key informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanyapartisipasi masyarakat Gampong Teulaga Tujoh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat dalam konteks pembangunan pengaman pantai masih dalam tahapan manipulasi serta pemberitahuan yang intens sebagaimana penjelasan Arnstein dalam konsep tangga partisipasinya*

*Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Garis Pengaman Pantai.*

**PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat masih bertitiktolak pada partisipasi dalam memikul beban pembangunan, dilain pihak partisipasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan dari penerimaan hasil-hasil pembangunan masih rendah. Prakarsa untuk melakukan tindak lanjut dari pada terbangunya bangunan-bangunan desa berupa usaha pemeliharaan penggunaan serta pengusaha bangunan proyek masih langka dan sukar dibangkitkan.

Selama periode 2007-2010, implementasi pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kota Langsa masih dirasa belum cukup menggembirakan, terutama dalam hal kaitannya dengan upaya mengurangi angka ataupun jumlah penduduk miskin.

Hal tersebut dapat terlihat dari fenomena bahwa meskipun secara persentase angka kemiskinan Kota Langsa selama dua tahun terakhir (2009-2010) cenderung mengalami penurunan, bahkan lebih rendah dari besar angka kemiskinan untuk tingkat Provinsi Aceh dan berada pada peringkat ketiga terendah diantara kabupaten/kota di Aceh, namun persentase angka kemiskinan

Kota Langsa selama ini masih berada diatas nilai persentase angka kemiskinan secara nasional. Dengan demikian dapat di rasakan secara nyata bahwa kantong kemiskinan di Kota Langsa sendiri sebagian besar berada di wilayah desa pesisir yaitu Desa Teulaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat.

Hal lain yang juga dapat mendasari kenyataan tersebut adalah data yang menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2010, angka kemiskinan Kota Langsa menurut Bappeda Kota Langsa (2012) tercatat sebesar 15,01 persen, yang masih lebih tinggi besarannya dari angka kemiskinan Kota Langsa tahun 2007 yang hanya 14,25 persen. Bahkan dalam kurun waktu antara tahun 2007-2010, persentase angka kemiskinan tertinggi tercatat pada tahun 2008 yang mencapai 17,97 persen.

Kembali ditekankan bahwa secara khusus ketertarikan khusus penulis juga mendekati ketertarikan terhadap keberadaan program pembangunan garis pengaman pantai di Desa Teulaga Tujuh (Pusong). Hal ini dikuatkan oleh adanya keinginan mengungkap fenomena mengenai ketidaksampaian target perencanaan program pembangunan garis pengaman pantai tersebut meski telah 2 tahap dilaksanakan. Tentu manajemen pembangunan yang dilaksanakan masih memiliki kekurangan dalam hal efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang telah dikerahkan. Dengan kata lain manfaat seperti berkurangnya jumlah masyarakat miskin di desa tersebut masih sulit diharapkan tercapai. Malahan dapat menjadi batu sandungan bagi pencapaian cita tersebut.

Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah (Bambang Triatmojo, "*Teknik Pantai*"). Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, dimana posisinya tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Perubahan garis pantai disebabkan oleh faktor alam dan/atau

faktor manusia. Faktor alam diantaranya gelombang laut, arus laut, angin, sedimentasi sungai, kondisi tumbuhan pantai serta aktivitas tektonik dan vulkanik. Sedangkan faktor manusia antara lain pembangunan pelabuhan dan fasilitas-fasilitasnya (misalnya *breakwater*), pertambangan, pengerukan, perusakan vegetasi pantai, pertambangan, perlindungan pantai serta reklamasi pantai.

Perubahan garis pantai di wilayah pantai Gampong Teulaga Tujuh disebabkan terjadinya abrasi. sebagian besar garis pantai telah terabrasi sehingga kini garis pantai di wilayah penelitian telah mendekati dan bahkan melewati jalur jalur strategis aktivitas masyarakat sehari - hari. Perubahan garis. Hal inilah yang mendorong dilakukannya pengamanan garis pantai melalui pembuatan dinding beton di sepanjang garis pantai khususnya yang paling rawan dengan akibat abrasi yang selalu terjadi.

Dengan kata lain perwujudan program pembangunan garis pengaman pantai di Gampong Teulaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat tersebut merupakan langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh bersama Pemerintah Kota agar segala akibat dari abrasi garis pantai tersebut dapat dicegah dan diminimalisasi. Adapun dalam penggunaan Sumber Daya Keuangan (Anggaran) yang dialokasikan untuk program pembangunan garis pengaman pantai ini dalam APBD Provinsi Aceh yakni sebesar 2,5 Milyar Rupiah. Hasil dari pelaksanaan pembangunan ini berwujud dinding *stonebag* (Kombinasi antara material semen dan Batu Besar) yang memanjang menyusuri garis pantai dengan ketinggian dari dasar bangunan hingga 10 Meter. Bangunan ini yang akan bermanfaat menghadang ombang yang relatif tinggi pada saat angin kencang dan memicu abrasi.

Penulis kemudian meyakini bahwa sebenarnya rangkaian pembangunan desa sebagaimana dijelaskan di atas melalui penanggulangan kemiskinan akan mudah terealisasi bila terjadi sinergitas antara

pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli atau swasta, pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang *pro poor* dengan mengemas dalam program berbasis masyarakat yang mengenali kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi mampu menjadi salah satu peran utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Pengaman Pantai di Desa Teulaga Tujoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program pembangunan Pengaman Pantai di Desa Teulaga Tujoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif untuk menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan yang di dapat dari para informan.

## TELAAH PUSTAKA

### Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintahan dan lain-lain. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan.

Beberapa pengertian Pembangunan menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Johan Galtung Pembangunan yang diterjemahkan oleh Trijino (2007) ke dalam Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pembangunan merupakan “upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam”.

Sedangkan menurut Benny H. Hoed (1998) pembangunan adalah “Pembangunan adalah upaya sistematis melepaskan diri dari keterbelakangan dan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat”.

Ahli lain, Drs. Djoko Oentoro mendefinisikan Pembangunan sebagai “pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita.

Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai “*transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat*”.

Sementara Slamet Triyono secara sederhana mendefenisikan Pembangunan sebagai semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial.

Dan merupakan sebuah transformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang digerakkan atas tujuan atau strategi yang diinginkan yang berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya penataan ruang diantaranya karena beberapa hal positif yang dikandungnya : (Alastaire White dalam RA. Santoso Sastropoetro, 1998)

- 1) Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.
- 2) Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang rendah.
- 3) Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
- 4) Merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
- 5) Mendorong timbulnya rasa tanggungjawab.
- 6) Menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan
- 7) Menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
- 8) Menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
- 9) Membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian orang lain.
- 10) Lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

### Definisi Partisipasi

Menurut Keith Davis (Reksopoetranto, 1992), kata partisipasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian, *participator* dimaknai sebagai yang mengambil bagian atau sering disebut dalam bahasa umum sebagai

keikutsertaan. Karenanya partisipasi sering dikatakan sebagai peran serta atau keikutsertaan mengambil bagian dalam kegiatan tertentu.

Partisipasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kandungan kapital yang dimiliki seseorang tersebut. Partisipasi hanya mungkin dilakukan seseorang bila ada kapital sosial, yaitu jaringan kerja, aturan-aturan yang jelas dan kepercayaan. Jaringan merupakan lintasan bagi proses berlangsungnya pertukaran, sementara kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran tersebut berjalan lancar sementara aturan merupakan jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung adil atau tidak (Saragi, 2004).

Sebelumnya sangat penting diketahui definisi dari masyarakat itu sendiri. Adapun menurut Sadeli (Masyurdin, 1994:43), masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya. Sedangkan Ralph Linton, menyatakan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri, dan mereka menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam wilayah tertentu, dimana terdapat kesadaran bahwa mereka adalah satu kesatuan sosial dan memiliki sistem kesatuan serta sistem kebudayaan sendiri yang selalu berubah.

Diketahui bahwasanya pengertian dari partisipasi juga telah mengalami berbagai penyimpangan sehingga lebih mendekati apa yang sering disebut sebagai "mobilisasi" atau malah sering sekali diartikan sebagai "rekayasa sosial", dimana masyarakat tetap saja didudukkan sebagai objek pembangunan.

Oleh karenanya terdapat beberapa pengertian partisipasi yang dapat dipakai atau dirumuskan oleh Parwoto (2006) berjudul Pengorganisasian Masyarakat sebagai berikut :

- a. Pelibatan diri pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama.
- b. *“Voluntary involvement of people in making and implementing decisions directly affecting their lives....* Pelibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.
- c. *“A voluntary process by which people including the disadvantaged ( income, gender, ethnicity, education ) influence or control the decisions that affect them .* Suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, dalam keseluruhan proses kegiatan yang berlangsung. Sehingga partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan sekelompok masyarakat, baik secara aktif maupun sukarela dengan alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam suatu proses kegiatan baik pemerintahan maupun pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga perkembangannya.

### Bentuk-bentuk Partisipasi

Sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat/kelompok terdapat beberapa wujud dari partisipasi :

Menurut Vaneklasen dan Miller membagi partisipasi atas (Handayani, 2006) :

- 1) Partisipasi Simbolis :  
Masyarakat duduk dalam lembaga resmi tanpa melalui proses pemilihan dan

tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya.

- 2) Partisipasi Pasif :  
Masyarakat diberi informasi atas apa yang sudah diputuskan dan apa yang sudah terjadi. Pengambil keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan tanggapan dari masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu arah.
- 3) Partisipasi Konsultatif :  
Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Hasil jawaban dianalisis pihak luar untuk identifikasi masalah dan cara pengatasan masalah tanpa memasukkan pandangan masyarakat.
- 4) Partisipasi Insentif Material :  
Masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk mendapatkan makanan, uang, atau imbalan lainnya. Masyarakat menyediakan sumber daya, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka tidak memiliki keterikatan untuk meneruskan partisipasinya ketika masa pemberian insentif selesai.
- 5) Partisipasi Fungsional  
Masyarakat berpartisipasi karena adanya permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan. Mungkin ada keputusan bersama tetapi biasanya terjadi setelah keputusan besar diambil.
- 6) Partisipasi Interaktif  
Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Karena masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan maka mereka akan mempunyai keterikatan untuk mempertahankan tujuan

dan institusi lokal yang ada di masyarakat juga menjadi kuat.

#### 7) Pengorganisasian Diri

Masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara mandiri. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, tetapi kontrol bagaimana sumber daya tersebut digunakan berada di tangan masyarakat sepenuhnya.

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat ikut serta dengan pemerintah memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama.

#### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Partisipasi aktif masyarakat mutlak diperlukan dalam proses pembangunan, apalagi kalau ditilik dari paradigme pembangunan yang berpusat pada rakyat yang mana pembangunan pada dasarnya adalah merupakan proses perubahan (bukan berorientasi pada hasil), salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan perilaku dan sikap. Menurut Soetomo (2002) salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku adalah dengan melihat pada adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik secara kualitas dan kuantitas.

Beberapa pihak mencoba merumuskan pengertian partisipasi dengan memasukkan dua kriteria yakni keterlibatan dan faktor yang melatar belakangi dan mendorong keterlibatan tersebut (dalam Soetomo 2002). Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut

partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Apabila yang ada hanya unsur keterlibatan dan tidak didorong oleh determinasi dan kesadaran maka hal tersebut bukan partisipasi, melainkan mobilisasi. Pengertian partisipasi dengan memasukkan kedua kriteria tersebut adalah yang lebih sesuai dengan kerangka berpikir yang dikembangkan dalam strategi Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas.

Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi dan menikmati hasil. Apabila dikenal ada pengertian partisipasi parsial dan partisipasi profesional, maka yang dimaksud adalah dalam pengertian sebagai partisipasi profesional, karena bukan hanya dalam salah satu bagian dari proses tetapi meliputi keseluruhan proses. Dalam berbagai wacana juga sering dijumpai adanya pengertian partisipasi yang bersifat instrumental, yaitu partisipasi dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan partisipasi yang bersifat transformasional, dimana partisipasi dianggap sebagai tujuan. Berkenaan dengan kedua sifat tersebut, dalam Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas, partisipasi yang dimaksudkan meliputi keduanya, sebagai alat sekaligus tujuan. Dengan demikian, dalam proses pembangunan akan terjadi perkembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara kumulatif yang tercermin dalam proses berkelanjutan.

Sudut pandang yang lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat berkedudukan sebagai input sekaligus *output*. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu factor pendukung keberhasilan pembangunan, dilain pihak juga dikatakan bahwa

pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakatnya, termasuk dalam berpartisipasi. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan juga merupakan pencerminan, bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memfokuskan perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya, bukan semata-mata pada hasilnya dalam bentuk material.

### **Keberadaan Lembaga Lokal**

Dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan senantiasa tidak lepas dengan keberadaan berbagai lembaga sosial yang diperlukan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Namun walaupun lembaga lokal masih memiliki kekurangan, masyarakat lebih memilih bergabung dan aktif menjadi anggota kemasyarakatan seperti misalnya Lembaga Tahlilan (Imron, Soeprpto dan Suwondo, (2002). Kecenderungan masyarakat untuk memilih lembaga lokal sebagai wadahnya adalah melalui suatu proses yang panjang yakni dimana dalam suatu masyarakat tertentu mempunyai kekhususan-kekhususan yang ada dalam masyarakat pedesaan.

Ciri khusus masyarakat pedesaan itu dapat dilihat misalnya masyarakat desa sangat kuat keterkaitannya pada nilai-nilai lama seperti budaya/adat istiadat maupun agama. Nilai-nilai lama atau biasa disebut dengan budaya tradisional itu menurut Dove (1985) dalam Imron, Soeprpto dan Suwondo (2002) sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat dimana budaya tradisional itu berada. Oleh karena itu perlu mengembangkan atau penguatan kelembagaan pada lembaga yang ada di dalam masyarakat.

Peran yang besar dari lembaga lokal yang ada dalam masyarakat adalah lembaga lokal juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal (sebagai wadah pemberdayaan masyarakat). dengan cara proses belajar sosial, Proses belajar sosial merupakan bagian yang penting dari strategi pengelolaan sumber daya lokal yang berorientasi pada perspektif *people – centred development*. Peningkatan kemampuan ini tidak melalui pendidikan formal, akan tetapi melalui partisipasi dan interaksi di dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perencanaan.pembangunan. Dengan kata lain mereka mengembangkan kemampuan mereka melalui pengalaman mereka berinteraksi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Untuk mempercepat proses belajar sosial ini perlu diupayakan agar proses ini merupakan suatu upaya yang disadari dan terarah (Tjokrowinoto, 2002). Disamping itu lembaga yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sering muncul masalah terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas lokal. Masyarakat lokal dianggap tidak mampu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, atau masyarakat dianggap tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Mungkin memang dapat dibenarkan bahwa masyarakat belum siap atau belum mampu dan masih rendah keinginannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi sering kita lihat bahwa media atau sarana untuk berpartisipasinya masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sering pemerintah mendirikan suatu lembaga dalam masyarakat desa yang katanya untuk wadah masyarakat dalam membantu memecahkan masalah-masalah mereka. Tetapi pada kenyataannya lembaga ini jarang berhasil

membantu masyarakat untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

## PEMBAHASAN

Tuntutan otonomi daerah secara penuh terus dilakukan agar setiap daerah dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumber daya di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk mempercayai masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Terlalu besarnya dominasi negara selama ini (sentralisasi) yang menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar pada pemerintahan daerah terlebih dalam pemerintahan gampong. Proses perencanaan, pengambilan keputusan dan program pembangunan kerap kali dilakukan dengan sistem dari atas kebawah (*top-down*). Rencana program-program pembangunan diseragamkan di buat ditingkat pusat (atas) dan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, sedangkan potensi setiap daerah berbeda-beda. Sistem perencanaan pembangunan *top-down* yang bersifat sentralistik ini menyebabkan mandulnya partisipasi masyarakat. sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan hingga ke tahap pengawasan terhadap hasil – hasil pembangunan.

Suatu skema baru otonomi daerah, yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus ditunjukkan adanya saluran aspirasi masyarakat semenjak dini.

Disini dapat kita ketahui bahwa sudah seharusnya ide awal proses pembangunan harus menyertakan masyarakat didalam

perumusannya. Maka perumusan ini merupakan proses perumusan yang umum, yang mana pada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, dan kepentingan dasarnya. Artinya skema politik dan sistem perencanaan pembangunan yang lama, dimana rakyat hanya menerima putusan dari pemerintah (sistem *bottom-up*) supaya dapat terlaksana dengan baik. Dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah meletakkan komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai dari pemetaan sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta profesional masyarakat dan pemerintah daerah dari sejak awal tahap perencanaan sampai pemanfaatan dan pelestarian. Untuk mendukung pelaksanaan amanat Undang - undang No.25 Tahun 2004 ini, maka pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappena sudah mengeluarkan surat edaran tentang sistem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui satu forum yang disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disebut dengan Musrenbang.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini dapat dijelaskan secara keseluruhan beberapa indikasi mengenai keberadaan partisipasi masyarakat Gampong Teulaga Tujoh (Pusông) Kota Langsa khususnya dalam Program Pembangunan Pengaman Pantai di lokasi penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut terbagi dalam sub bagian analisis berikut ini.



## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian telah dijelaskan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya adalah sebagai bentuk kontribusi, yakni interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di Gampong Teulaga Tujoh dengan melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat gampong melalui upaya memutuskan serta menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan. Berbagai informasi yang telah dianalisa tersebut maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya partisipasi masyarakat Gampong Teulaga Tujoh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat dalam konteks pembangunan pengaman pantai masih dalam tahapan manipulasi serta pemberitahuan yang *intens* sebagaimana penjelasan Arnstein dalam konsep tangga partisipasinya. Kondisi ini justru diperkuat oleh adanya fenomena spesifik seperti kompleksitas kehidupan masyarakat pesisir di lokasi penelitian yang secara signifikan meningkat serta degradasi perilaku partisipatif itu sendiri terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan. Informasi yang diperoleh justru menggambarkan bahwa sebagaimana keinginan partisipasi masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi hasil-hasil pembangunan masih belum mendapatkan posisi yang ideal. Oleh karenanya proses belajar berpartisipasi dalam setiap rangkaian *action* pembangunan Gampong Teulaga Tujoh dapat dilaksanakan secara berkontinuitas sehingga dalam jangka panjang jenjang partisipasi masyarakat gampong lebih meningkat dan memberikan hasil yang positif bagi

pembangunan Gampong Teulaga Tujoh dalam jangka panjang.

2. Simpulan selanjutnya berkaitan dengan keberadaan berbagai faktor yang mempengaruhi sustainabilitas partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Gampong Teulaga Tujoh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat. Adapun faktor – faktor yang telah dijelaskan melalui wawancara dengan informan penelitian ini mencakup faktor; (1) bahwasanya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Gampong Teulaga Tujoh yang masih didominasi oleh kepala keluarga pada tingkat SLTP menjadi hambatan tersendiri terhadap upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berlangsung, (2) Faktor kepemimpinan lokal yang juga merupakan salah satu kunci kesuksesan keberhasilan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada adanya kepemimpinan yang baik dari tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat seperti para tokoh masyarakat, pihak pemerintah lokal, dan pemimpin - pemimpin masyarakat lainnya, sehingga akan ada yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam pelaksanaan program, dan (3) Ketidakberdayaan sumber daya perekonomian keluarga masyarakat di lokasi penelitian.

### Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, penulis bermaksud menjelaskan beberapa hal penting sekaligus menjadi saran penelitian ini bagi upaya perbaikan pelaksanaan pembangunan di Gampong Teulaga Tujoh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat secara khusus dan umumnya di seluruh wilayah desa pesisir pada wilayah terluar di Indonesia yang mencakup beberapa hal berikut:

1. Tuntutan otonomi daerah secara penuh terus dilakukan agar setiap daerah dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumberdaya di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk mempercayai masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Terlalu besarnya dominasi Negara selama ini yang menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar pada pemerintahan daerah terlebih dalam pemerintahan gampong. Proses perencanaan, pengambilan keputusan dan program pembangunan kerap kali dilakukan dengan system dari atas kebawah (*top-down*). Rencana program-program pembangunan diseragamkan di buat ditingkat pusat (atas) dan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, sedangkan potensi setiap daerah berbeda-beda. Sistem perencanaan pembangunan *top-down* yang bersifat sentralistik ini menyebabkan mandulnya partisipasi masyarakat. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Oleh itu, di masa mendatang, keterlibatan segenap masyarakat Gampong TeulagaTujoh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat dalam tahap perencanaan dan penentuan alternative keputusan seyogyanya dapat ditingkatkan dengan intens tidak hanya sebatas program pembangunan fisik saja akan tetapi juga mencakup upaya pembangunan sumberdaya manusia pula. Peneliti menganggap keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan penentuan alternative keputusan pembangunan di wilayah mereka merupakan tahap awal yang paling penting yang akan menentukan partisipasi masyarakat pada tataran pelaksanaan pembangunan berikutnya.
2. Perkembangan institusi non pemerintah yang cenderung lambat khususnya dalam upaya memotivasi munculnya ide masyarakat gampong serta melaksanakan

pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat sepatutnya mendapat perhatian bagi berbagai pihak yang *concern* terhadap hal tersebut. Dengan demikian penelitian ini meyakini bahwa meski letak geografis lokasi penelitian dinilai cukup jauh namun penguatan wilayah terluar yang cenderung menjadi desa tertinggal tersebut justru memiliki posisi strategis terhadap ketahanan pembangunan di wilayah nusantara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Trijino, Lambang, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Benny H. Hoed, 1998, *Perencanaan Pembangunan Desember 14* Hal.67-72, Unit KORPRI BAPPENAS, Jakarta.
- Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21, Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta.
- Sastropetro, R.A. Santoso. 1998. *Partisipasi, Kominikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Penerbit Alumi.
- Reksopoetranto. S., 1992. *Manajemen Proyek Pembangunan*. FE Universitas Indonesia. Jakarta
- Sumarto, Hetifah, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.